

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini terbukti dari banyaknya pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Jalan sepanjang 3.432 Km; jalan tol sepanjang 947 Km; jembatan gantung sebanyak 134 unit; dan jembatan sepanjang 39,8 Km dibangun di era pemerintahan Jokowi yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian Indonesia (Fabian, dalam Kompas, Oktober 2018).

Dalam kegiatan pembangunan jalan tol, tanah merupakan salah satu sarana yang penting, namun dengan semakin meningkatnya pembangunan, kebutuhan tanah semakin terbatas. Hal itu yang membuat pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan tugas serta tanggungjawab untuk memajukan dan mensejahterakan Negara (Supriyadi, 2011: 1). Salah satu kegiatan pengadaan tanah yang bersifat kepentingan umum adalah pembangunan jalan tol.

Pada tahun 2017 pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan kendaraan di area tol Jakarta – Cikampek yang melintas di daerah Cawang dengan membangun tol Cibitung – Cilincing yang direncanakan beroperasi di tahun 2019. Untuk pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing, pemerintah melakukan pembebasan lahan di delapan belas Kabupaten Bekasi, dan empat Kelurahan di (Rahma, dalam Tempo, April 2019).

Dalam penelitian ini penulis telah mengikuti proses pengadaan tanah di salah satu Kabupaten Bekasi tepatnya di Desa Pantai Makmur Tarumajaya. Sekitar 162 Kepala Keluarga terkena dampak pengrusakan pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Dampak dari pembangunan jalan tol ini warga harus merelakan rumah yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama $\pm$ 20 tahun untuk dijadikan lahan pembangunan. Setiap pagi warga merasa khawatir oleh kegiatan pembangunan, getaran yang dihasilkan oleh alat gali (*excavator*) dianggap warga

sebagai ancaman. Menurut salah satu warga Desa Pantai Makmur (AL, 28/02/19) sosialisasi mengenai pembangunan jalan tol tidak berjalan dengan semestinya. Banyak warga yang mengeluhkan proses pembangunan untuk dihentikan sementara hingga proses sosialisasi selesai.

Dalam melakukan kegiatan pembangunan sudah seharusnya pemerintah melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah. Karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, akan berdampak bagi masyarakat baik positif maupun dampak negatif. Dalam hasil observasi awal penulis di Desa Pantai Makmur, penulis melihat salah satu hambatan dalam proses pengadaan tanah adalah adanya penolakan dari warga untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melancarkan proses pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Warga menolak untuk meninggalkan tempat mereka karena menilai proses ganti rugi yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sebagai bentuk penolakan warga membuat baliho atau spanduk yang berisi permohonan keadilan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi yang dipasang disekitar proyek pembangunan. Walau demikian warga tidak pernah melakukan aksi unjuk rasa di sekitar area proyek pembangunan karena warga berpendapat, untuk menyuarakan hak tidak selalu harus berdemonstrasi atau membuat keributan. Pada awalnya warga memang mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan negara.

Dalam hal ini pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan tol Jakarta – Cikampek menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan warga. Berbagai pendapat atau opini warga muncul untuk menanggapi pembangunan ini. Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis (29/02/2019) umumnya warga berpendapat dengan adanya pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing hanya untuk menguntungkan pemerintah. Dalam hal ini sudah seharusnya pemerintah dapat menjalin komunikasi yang baik dengan warga agar dapat mengubah *mindset* bertujuan untuk mengubah pendapat warga yang negatif menjadi positif dalam menanggapi pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing. Seperti yang diungkapkan oleh Goran Hedebo (dalam Cangara, 2012: 71-72)

komunikasi memiliki fungsi untuk menjadi sarana dalam membantu pelaksanaan program-program pembangunan.

Komunikasi dalam pembangunan bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat yang bertujuan mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya untuk meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat (Uchjana, 2011). Melalui komunikasi yang dijalin oleh pemerintah dengan warga diharapkan dapat mengubah pendapat atau opini warga terkait pembangunan jalan tol ini.

Seringkali kesenjangan komunikasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat menimbulkan penilaian yang negatif terhadap program-program pemerintah. Di Indonesia sendiri pembangunan yang dilakukan dengan proses pengadaan tanah identik sebagai suatu kegiatan yang negatif. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tahun 2018 terdapat 79 lokasi yang menjadi titik pengadaan tanah. Selain itu 60 dari 79 kasus penggusuran dilakukan tanpa solusi kepada korban dampak penggusuran (Adhi, dalam CNN, Oktober 2018).

Dari hasil penelusuran penelitian terkait dengan proses pengadaan tanah, penulis melihat adanya dua penelitian yang membahas mengenai tanggapan atau pendapat masyarakat terhadap penggusuran. Penelitian pertama berjudul *Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Penggusuran Lahan (Studi Kasus Penggusuran Lahan di Wilayah Kelurahan Gunung Anyar)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan masyarakat menyangkut eksternalisasi, obyektivitas, dan eksternalisasi yang merupakan dasar suatu konstruksi kenyataan (Sabrina, 2017).

Hasil penelitian Erika dalam penelitian ini adanya faktor perekonomian dan latar belakang pendidikan korban penggusuran mempengaruhi konsepsi tentang pengadaan lahan. Masyarakat yang terkena dampak penggusuran dengan kondisi perekonomian menengah kebawah mengkonstruksi penggusuran lahan sebagai realitas negatif. Sedangkan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan memiliki kondisi perekonomian menengah keatas mengkonstruksi penggusuran lahan dengan hal positif (Sabrina, 2017).

Sedangkan dalam penelitian kedua yang berjudul *Makna Penggusuran Menurut Masyarakat Miskin Kota Surabaya (Studi Kasus Warga Miskin Pinggir Rel Korban Rencana Penggusuran Double Track oleh PT. KAI Dalam Perspektif Konstruksi Sosial Berger di Kelurahan Sidotopo)*, dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana warga pinggir rel di Kelurahan Sidotopo memaknai rencana penggusuran yang terjadi di wilayah mereka. Dari hasil penelitian Tiandi menjelaskan warga pinggir rel kereta memaknai penggusuran sebagai hal yang negatif atau buruk. Warga pinggiran rel telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi rencana penggusuran, mereka beranggapan bahwa penggusuran hanya akan merugikan pihak korban (Tiandi, 2016).

Bisa disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu proses pengadaan tanah masih dipandang sebagai kegiatan yang negatif oleh masyarakat yang terkena dampak penggusuran. Hal yang membuat proses pengadaan tanah menjadi kegiatan yang negatif salah satunya adalah proses ganti rugi yang dianggap tidak menguntungkan.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini penulis akan menekankan pentingnya opini publik dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Hubungan antara pemerintah atau organisasi di seluruh dunia akan mendapat perhatian dari masyarakat luas karena sifat komunikasi yang dilakukan menyangkut manusia di dalam kedudukannya, baik sebagai masyarakat secara luas atau sebagai individu (Ester, 2015:2).

Adanya sikap pro dan kontra dari warga membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana opini warga Desa Pantai Makmur yang dilihat dari indikator *believe* (kepercayaan), *attitude* (sikap), *perception* (persepsi). Pembangunan ditengah pemukiman warga sudah seharusnya memberikan dampak positif baik dari sisi ekonomi maupun aspek sosial. Berdasarkan buku Studi Kelayakan (Suratman, 2001: 31) mengatakan “setiap proyek harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas termasuk terhadap pengaruhnya perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian negara”. Secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi negara meningkat melalui pembangunan infrastruktur seperti yang diungkapkan oleh Ekonom Arif Budimanta, pembangunan

infrastruktur memicu pertumbuhan ekonomi dan mendorong *investor* asing ke Indonesia (Wardah, 2018).

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul **“Opini Warga Desa Pantai Makmur Tarumajaya Dalam Proses Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing”**

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui opini warga Desa Pantai Makmur Tarumajaya dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan yang timbul setelah mengetahui latar belakang dan mendapatkan fokus penelitian, adalah bagaimana opini warga Desa Pantai Makmur Tarumajaya dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui opini warga Desa Pantai Makmur Tarumajaya dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing.

1.5. Manfaat

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lain dalam rangka pengembangan bidang komunikasi pembangunan lebih lanjut.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan pembangunan dan melakukan kegiatan penggusuran agar dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tanpa merugikan warga.